

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI,  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI,  
LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA,  
DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja DPR RI dengan Menlu RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin/29 November 2010  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Pemerintah melalui Kemlu RI tentang rencana Pembukaan Hubungan Diplomatik RI dengan 21 Negara PBB  
Hadir : 29 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Hadir : Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

Komisi I DPR RI menyetujui rencana pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik RI dengan 21 negara PBB yang meliputi negara-negara Nauru, Kiribati, Tuvalu, Bhutan, Mauritania, Niger, Chad, Republik Afrika Tengah, Equatorial Guinea, Sao Tome dan Principe, Malawi, Botswana, Belize, El-Salvador, Haiti, Republik Dominika, Saint Kitts dan Nevis, Antigua dan Barbuda,

Barbados, San Marino, dan Montenegro. Terkait dengan rencana tersebut, Komisi I DPR RI menyampaikan dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perluasan hubungan diplomatik RI dengan negara-negara PBB diharapkan akan semakin meningkatkan kerjasama internasional bagi kepentingan nasional RI dan mengoptimalkan diplomasi Indonesia terutama dengan memperhatikan semakin kuatnya kecenderungan ke arah regionalisme dan terbentuknya berbagai kelompok kerjasama regional, baik geografi maupun fungsional.
2. Dengan adanya rencana pembukaan hubungan diplomatik tersebut, pemerintah agar senantiasa mengedepankan kepentingan nasional, serta memprioritaskan perlindungan terhadap WNI.
3. Pembukaan perwakilan-perwakilan RI di negara-negara tersebut hendaknya disesuaikan dengan skala prioritas yang diantaranya mempertimbangkan faktor resiprositas negara-negara tersebut dengan RI, serta tingkat urgensi dan beban kerja di negara-negara tersebut, sehingga dapat selaras dengan kemampuan alokasi keuangan negara dan penempatan SDM secara proporsional.
4. Membuka peluang bagi kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 November 2010

**KETUA RAPAT,**

ttd

**DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI**

**A-73**